

Evaluasi Program SMP Standar Nasional Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan^{*)}

Ida Kintamani Dewi Hermawan, e-mail idakintamani@yahoo.com

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program SMP Standar Nasional berdasarkan tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). Metode yang digunakan adalah survai dengan populasi semua SMP Standar Nasional sedangkan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling* dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sampel yang diambil sebesar 91,3% adalah SMP Negeri dan sisanya SMP Swasta dengan jumlah siswa berkisar antara 250—1.250 anak. Dari delapan SNP hanya tujuh SNP yang bisa dilakukan analisis, sedangkan pembiayaan tidak dapat dilakukan analisis karena data tidak akurat. Dari tujuh SNP nilai maksimal yang harusnya diperoleh sebesar 289, namun kenyataannya nilai tertinggi hanya 241 (83,39%) dan nilai terendah sebesar 170 (58,82%). Dari tujuh SNP pencapaian Standar Proses yang tertinggi sebesar 32 sekolah (72,73%) dan Standar Kompetensi Lulusan terendah sebesar 22 sekolah (50,0%). Bila rata-rata nilai sebesar 208 diasumsikan SNP telah tercapai, maka hanya 23 sekolah (52,27%) yang telah mencapai SNP, sedangkan 21 sekolah (47,73%) lainnya belum mencapai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 7 SNP hanya dicapai lebih dari separuh. Karena itu, Standar Kompetensi Lulusan yang terendah perlu ditingkatkan pencapaiannya sehingga pencapaian nilai SNP dapat ditingkatkan. Untuk standar pembiayaan perlu dilakukan penelitian tersendiri.

Kata kunci: *evaluasi, sekolah standar nasional (SNN), standar nasional pendidikan (SNP), standar kompetensi lulusan (SKL), standar proses, dan sekolah menengah pertama (SMP).*

ABSTRACT: The purpose of this study was to evaluate the national standard of junior secondary school (JSS) program based on the level of achievement of Educational National Standards (ENS). The method used was a survey with a population of all the national standards of JSS, while the sampling method used was simple random sampling with a descriptive analysis technique. The results showed that the samples at 91.3 percent is a public JSS, and the remainder in private JSS. The schools vary from 250 to 1250 children. Of the eight ENSs, only seven ENSs that can be analyzed, while the financing could not be analyzed, since the data were not accurate. Of the seven ENSs, the maximum value should be obtained at 289, but actually the highest score is only 241 (83.39%) and the lowest value of 170 (58.82%). Of the 7 ENSs, the highest achievement of Standard Process for 32 schools (72.73%) and the lowest Graduates Competency Standards for the 22 schools (50.0%). When the average value of 208 ENSs have been achieved then assumed that only 23 schools (52.27%) who have reached the ENS, while 21 schools (47.73%), and others are not achieved. Thus, it can be said that the 7 ENSs reached more than half. Therefore, the lowest competency standards needs to be achieved so that schools can improve attainment NSS value. For financing standard should take its own research.

Keywords: evaluation, national standard schools (SNN), educational national standards (ENS), graduates competency standards (GCS), standard process, junior secondary school (JSS).

Pendahuluan

Salah satu kewajiban yang dijalankan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) melalui pembangunan pendidikan (Sekretariat Negara, 2009).

Amanat ini kemudian diterjemahkan oleh Kemdiknas untuk mengem-bangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

^{*)} Artikel ini merupakan ringkasan dari Penelitian Program Riset untuk Peneliti dan Perekayasa LPND dan LPD tahun 2010

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada akhirnya, masyarakat Indonesia diharapkan memiliki karakteristik sebagaimana tujuan pendidikan nasional tersebut.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut, salah satu pilar pembangunan pendidikan yang dicapai adalah mutu, relevansi, dan daya saing. Mutu sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pendidikan karena pendidikan yang bermutu dapat memberikan manfaat, salah satu di antaranya adalah daya saing internasional. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Kemdiknas menargetkan pada tahun 2020-2025, pada tingkat satuan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP), Indonesia masuk dalam 3 besar olimpiade matematika atau sains internasional setiap tahunnya, sedangkan pada tingkat sekolah menengah, 50 persen siswa SMA meraih nilai TOEFL hingga 400, dan 50 persen siswa SMK meraih nilai TOIEC sampai 400 (Depdiknas, 2007).

SMP merupakan salah satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang turut menyelenggarakan pendidikan. Demikian pula halnya berkaitan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, mutu pendidikan pada satuan pendidikan SMP ini penting artinya karena pendidikan dasar merupakan landasan bagi jenjang pendidikan menengah (Depdiknas, 2003). Mutu yang kurang baik pada satuan pendidikan SMP akan mempengaruhi input bagi satuan pendidikan di atasnya seperti SMA, SMK, dan MA.

Berkaitan dengan mutu tersebut, Kemdiknas, dalam hal ini Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (Dit. PSMP, 2008), Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) melakukan peningkatan mutu pendidikan. Salah satunya adalah Program Sekolah Standar Nasional (SSN) sebagai bentuk implementasi dari kebijakan SNP. (Dit. PSMP, 2008). Kebijakan SNP ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No.20/2003) Bab IX, Pasal 35. Kemudian, SNP tersebut dijabarkan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005 tentang SNP (PP No.19/2005) yang meliputi delapan standar, yaitu isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Secara

operasional, masing-masing standar tersebut dijabarkan relatif secara rinci dalam sejumlah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas).

Memperhatikan sebaran mutu tersebut, Dit. PSMP melalui Program SSN ini mengklasifikasi sekolah sebagai sekolah standar nasional, mandiri, dan bertaraf internasional. Merujuk pada Pasal 11 pada PP No.19/2005, sekolah standar merupakan sekolah yang belum memenuhi SNP, dan sekolah mandiri adalah sekolah yang telah atau hampir memenuhi SNP. Program SSN ini bertujuan untuk meningkatkan sekolah standar menuju sekolah mandiri sesuai dengan SNP dengan cara memberikan hibah (*block grant*) ke sekolah agar sekolah mampu meningkatkan mutu pendidikan menurut SNP. Program SSN dimulai sejak tahun 2004 dan pelaksanaannya dilakukan melalui serangkaian langkah seperti persiapan dan pelaksanaan pengembangan. Langkah persiapan yang dilakukan meliputi sosialisasi, seleksi, penetapan sekolah standar, dan penyusunan rencana SSN. Sementara itu, langkah pengembangan meliputi penyusunan tim pengembangan SSN di sekolah, penyusunan rencana pengembangan sekolah (RPS), penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), strategi dan fokus pengembangan program SSN, pelaksanaan program, jadwal pelaksanaan, dan supervisi. Sekolah yang ditetapkan sebagai rintisan SSN menerima bantuan *block grant* (hibah) dari Dit. PSMP. Karena itu, efektivitas program untuk meningkatkan mutu pendidikan di tingkat sekolah dari kualifikasi sekolah standar menjadi sekolah mandiri patut menjadi perhatian karena keberhasilan program SSN ini mencerminkan implementasi kebijakan SNP (Dit. PSMP, 2008).

Berdasarkan uraian di atas, secara umum permasalahannya adalah bagaimana pencapaian SNP dalam implementasi Program SMP Standar Nasional? Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan studi ini adalah mengevaluasi tingkat pencapaian SNP atau efektivitas implementasi Program SMP Standar Nasional yang dilaksanakan oleh Dit. PSMP.

Kajian Literatur

Evaluasi

Chelimsky (1989) menyatakan bahwa evaluasi

program merupakan penilaian terhadap efektivitas, implementasi, dan desain program. Demikian pula halnya, Brinkerhoff et al (1983) menyebutkan di antara aspek atau dimensi evaluasi program meliputi hasil (*impacts or outcomes*), dan implementasi atau proses, serta tujuan dan rencana. Dengan demikian, implementasi program merupakan salah satu aspek dari evaluasi program.

Salah satu tujuan dari evaluasi program adalah evaluasi terhadap implementasi suatu program (Langbein dan Felbinger, 2006). Berkaitan dengan hal ini, para ahli tidak selalu secara lugas menggunakan terminologi implementasi. Ungkapan lain dari implementasi dinyatakan dengan menggunakan pertanyaan seperti apakah program dilaksanakan menurut rencana. Selain itu, terminologi lain yang digunakan adalah operasionalisasi program dan evaluasi proses serta manajemen. Meskipun banyak terminologi yang digunakan, untuk selanjutnya evaluasi ini disebut sebagai evaluasi proses (Mark et al, 2000).

Evaluasi proses memiliki beberapa karakteristik. Pertama, evaluasi proses termasuk dalam evaluasi formatif, yakni evaluasi yang dilakukan ketika proses sedang berjalan. Kedua, evaluasi proses dapat berdiri sendiri atau dikembangkan secara kombinasi dengan jenis evaluasi lainnya. Pada umumnya evaluasi proses digabungkan dengan evaluasi hasil (*effective evaluation*). Ketiga, evaluasi proses selalu bersifat retrospektif, yakni melihat apa yang sudah terjadi untuk memberikan petunjuk pada masa mendatang.

Ketika evaluasi proses berdiri sendiri, evaluasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses aktivitas program yang dilaksanakan dalam rangka perbaikan. Sementara itu, sebagai kombinasi dengan evaluasi hasil, evaluasi proses bertujuan untuk membantu menentukan desain evaluasi hasil dan membantu menjelaskan temuan-temuan evaluasi hasil. Pada kasus kombinasi, evaluasi proses dilakukan secara simultan dengan evaluasi hasil. Oleh karena itu, evaluasi proses mengantisipasi tidak hanya masalah-masalah implementasi kebijakan melainkan juga membantu evaluasi hasil menjawab pertanyaan tentang akuntabilitas.

Menurut Langbein dan Felbinger (2006), aspek evaluasi proses meliputi akuntabilitas dan manajemen program. Menurut Chelimsky (1989), beban kerja staff dapat dimasukkan dalam kategori manajemen sedangkan evaluasi oleh pemangku kepentingan

(*stakeholders*) merupakan indikator yang harus dicari dalam aspek implementasi.

Jika suatu program sudah direncanakan dengan baik, target populasi program perlu dikaji secara spesifik sehingga program yang tersusun akan memenuhi kebutuhan kelompok target sasaran program. Hal-hal yang dapat dikaji pada aspek profil klien meliputi identitas dan kebutuhan kelompok target penerima program tersebut. Identitas dapat dikaji melalui aspek gender dan usia. Kemudian, identitas dan kebutuhan dibandingkan dengan rencana program. Selain itu, peserta program juga merujuk pada karakteristik individual seperti keyakinan (*beliefs*), sikap atau aspek demografis (Mark et al, 2000).

Chelimsky (1989) membedakan personil dari sumber daya. Mark, et al (2000) menyatakan bahwa sumber daya meliputi finansial, manusia, dan barang yang digunakan untuk mengatasi masalah. Disisi lain, Posavac dan Carey (1980) membedakan sumber daya menjadi manusia dan fisik yang diinvestasikan dalam program. Beban kerja staf dan proporsi orang yang menyelesaikan program merupakan input program. Dengan demikian, gambaran sumber daya manusia di atas sekaligus memperlihatkan bahwa terdapat sejumlah indikator yang perlu dikaji. Indikator tersebut meliputi kualifikasi, pengalaman, beban kerja staf, dan jumlah personil.

Sejumlah pertanyaan berikut dapat diajukan untuk membantu mengkaji kondisi program pada saat sekarang ini. Apakah masalah terus berkembang? Apakah masalah berkurang? Apakah masalah cukup berkurang sehingga program tidak lagi diperlukan? Apakah perubahan terjadi secara signifikan? Pertanyaan akuntabilitas juga diajukan pada evaluasi proses. Pertanyaan tersebut meliputi apakah program diimplementasikan sesuai dengan rencana, waktu, dan anggaran. Kesesuaian antara program dengan rencana merupakan kinerja program yang menunjukkan akuntabilitas karena pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana dapat membuahkan hasil tidak seperti yang diharapkan. Kesesuaian antara waktu dengan pelaksanaan diperlukan karena pelaksanaan yang terlambat dapat memberikan dampak tambahan seperti kemungkinan pengatur jadwal kembali atau bahkan mempengaruhi kemungkinan hasil program. Pada gilirannya akuntabilitas pelaksanaan program dipertanyakan.

Jadi, ketidaksesuaian pelaksanaan dengan rencana atau waktu memberikan dampak perlunya tambahan dana. Bila hal tersebut terjadi, akuntabilitas program tidak tercapai.

Posavac dan Carey (1980) menyatakan bahwa evaluasi proses harus dipertimbangkan sebagai suatu cara untuk memonitor tingkat pencapaian program yang dilaksanakan sebagaimana rencana. Sementara itu, Chelimsky (1989) membedakan antara evaluasi proses dengan monitoring masalah dan program. Perbedaan terletak pada sifatnya yang kontinu ketimbang sebagai sebuah proses potret tunggal. Monitoring berfungsi untuk memberikan informasi tentang karakteristik masalah atau menelusuri kemajuan program atau masalah.

Evaluasi hasil memiliki terminologi yang berbeda-beda, yakni penilaian dari kebaikan dan nilai (*assessment of merit and worth*) serta efektivitas. *Merit* merujuk pada kualitas program dalam kaitannya dengan kinerja sedangkan *worth* merujuk pada nilai kinerja tersebut sehingga menyebabkan perubahan sosial lebih luas. Cara pandang ini tampak kausalistik. Pengaruh terjadi karena kualitas kinerja program. Di sisi lain, efektif dapat diukur menurut kriteria tertentu. Pandangan Mark, et al (2000) tampak spesifik karena pandangan tersebut melihat kualitas, merujuk pada kinerja, dan kinerja pada perubahan.

Berbeda dengan pandangan Mark, et al (2000) dan Stufflebeam (2003) belum merujuk secara spesifik makna *merit and worth*. Menurut Stufflebeam (2003), *merit* merujuk pada *something's excellence* (keunggulan/mutu sesuatu) dan *worth* merujuk pada *it's excellence and utility* (keunggulan/mutu dan manfaatnya). Pendapat ini belum memperlihatkan rujukan *merit* sebagaimana pendapat Mark, et al (2000). Namun, pendapat Stufflebeam (2003) ini relatif serupa dengan Mark, et al (2008) tentang *worth*. Mutu suatu program perlu memperlihatkan manfaatnya.

Evaluasi hasil dapat bersifat formatif dan sumatif serta retrospektif. Evaluasi hasil bersifat formatif bila pertanyaan yang diajukan adalah *is it succeeding?* dan evaluasi hasil bersifat sumatif bila pertanyaan yang diajukan adalah *did the effort succeed?*. Namun, *assessment of merit and worth* juga merupakan evaluasi sumatif. Evaluasi hasil juga sifatnya retrospektif, yakni evaluasi ini berusaha mengetahui seberapa baik program telah berjalan. Hal ini berarti

bahwa perubahan yang dihasilkan pada kenyataannya merupakan hasil dari implementasi program bukan faktor lainnya.

Sebagai evaluasi sumatif, evaluasi hasil dapat berarti empat hal, yakni *impact*, *effectiveness*, *sustainability*, dan *transportability*. Suatu program ditujukan untuk kelompok target tertentu. *Impact* yang dimaksudkan adalah pencapaian kelompok target yang sesuai. Untuk *effectiveness*, evaluasi hasil sumatif mempertanyakan apakah kebutuhan prioritas telah terpenuhi. Pertanyaan yang diajukan pada *sustainability* adalah apakah keberhasilan dapat dipertahankan. *Transportability* adalah pendekatan yang digunakan dapat bermanfaat di tempat lain (Stufflebeam, 2003).

Evaluasi hasil bertujuan untuk menilai hasil (*outcome*) dan membantu mempromosikan dan mendokumentasikan keberhasilan. Evaluasi proses bertujuan untuk menilai implementasi dan membantu membimbing pelaksanaan serta menginterpretasikan hasil. Evaluasi proses merupakan salah satu langkah untuk membantu memperoleh interpretasi hasil dari program yang dilaksanakan.

Sekolah Standar Nasional

Program Sekolah Standar Nasional (SSN) ini ditujukan untuk meningkatkan mutu SMP dari sekolah potensial/formal standar menjadi SSN/formal mandiri. Karena itu, klien pada program ini adalah SMP peserta Program SSN. Dengan demikian, profil yang perlu diketahui meliputi identitas dan kebutuhan SMP peserta Program SSN. Namun, gambaran kajian pustaka di atas memperlihatkan bahwa identitas lebih merujuk pada individu. Sementara itu, pendidikan merupakan suatu proses transformasi yang terdiri dari unsur masukan (*input*), transformasi, keluaran (*output*), dan umpan balik. Di antara input adalah siswa sebagai *raw input* dan guru sebagai *instrumental input*. Karena itu, profil klien dapat secara spesifik merujuk pada karakteristik siswa atau guru seperti gender, usia, atau aspek demografis (Dit. PSMP, 2008).

Kepala sekolah dan guru serta masyarakat merupakan pelaku utama dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Mengingat entitas masyarakat sifatnya kompleks, partisipasinya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah direpresentasikan dalam bentuk organisasi komite sekolah. Berkaitan dengan

partisipasinya dalam Program SSN, komite sekolah merupakan salah satu anggota pengembang rencana pengembangan sekolah standar nasional (RPS SSN). (Dit. PSMP, 2008). Karena itu, klien dalam Program SSN ini bukan hanya sekolah tetapi termasuk di dalamnya juga komite sekolah. Dengan demikian, profil yang perlu diketahui dari komite sekolah adalah identitas dan persepsinya tentang kebutuhan SMP peserta Program SSN (Ditjen Mandikdasmen, 2005).

Standar Nasional Pendidikan

Berdasarkan PP No.19/2005 tentang SNP maka SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar ini diberlakukan untuk pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi sedangkan pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Dalam SNP terdapat delapan standar, yaitu 1) standar isi, 2) standar kompetensi lulusan, 3) standar proses, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana prasarana pendidikan, 6) standar pengelolaan, 7) standar penilaian, dan 8) standar pembiayaan.

Standar isi meliputi ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Standar sarana dan prasarana berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan

untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar standar pengelolaan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pembiayaan mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar penilaian pendidikan berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah survai karena studi ini mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Survai adalah studi yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Salah satu keuntungan yang diperoleh dari penggunaan penelitian survai adalah studi dapat melakukan generalisasi dari sampel terhadap populasi (Creswel, 2003).

Populasi dari studi ini adalah SMP yang tergabung dalam Program SSN, Direktorat Pembinaan SMP. Atas dasar populasi tersebut, 44 sampel SMP standar nasional yang terdapat pada Tabel 1 diambil dari 15 Provinsi dan 17 Kabupaten/Kota dengan menggunakan metode pengambilan sampel *simple random sampling* karena pengambilan sampel dalam studi ini memberikan kesempatan yang sama kepada SMP standar nasional untuk terpilih sebagai sampel. Sebagaimana dinyatakan Singarimbun dan Effendi (1995), sampel acak sederhana ialah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit studi atau satuan elemen dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Pengambilan sampel acak sederhana menggunakan tabel acak.

Studi ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan datanya. Kuesioner digunakan untuk menjangkau data primer yang akan meliputi variabel indikator implementasi dan hasil Program SSN dengan berdasarkan pada delapan standar nasional pendidikan. Data tentang implementasi dan hasil program digali dari kepala sekolah sebagai responden.

Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang implementasi dan hasil program. Teknis analisis yang digunakan

Tabel 1. Sampel Studi

No.	Propinsi	Kab/Kota	Jumlah	%
1.	DKI Jakarta	Kota Jakarta Barat	2	4.55
2.	Bangka Belitung	Kab. Bangka	1	2.27
3.	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	3	6.82
4.	DI Yogyakarta	Kab. Sleman	2	4.55
		Kota Yogyakarta	3	6.82
5.	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	3	6.82
6.	Bali	Kota Denpasar	4	9.09
7.	Jambi	Kota Jambi	3	6.82
8.	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	3	6.82
9.	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	1	2.27
10.	Sulawesi Selatan	Kota makasar	3	6.82
11.	Sumatera Utara	Kota Medan	3	6.82
12.	Sumatera Barat	Kota Padang	3	6.82
13.	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	2	4.55
14.	Sumatera Selatan	Kota Palembang	3	6.82
15.	Jawa Tengah	Kota Semarang	3	6.82
	Jumlah		44	100.00

merupakan analisis deskriptif yang ditujukan untuk variabel implementasi program yang mempengaruhi hasil Program SSN.

Hasil Penelitian dan Bahasan

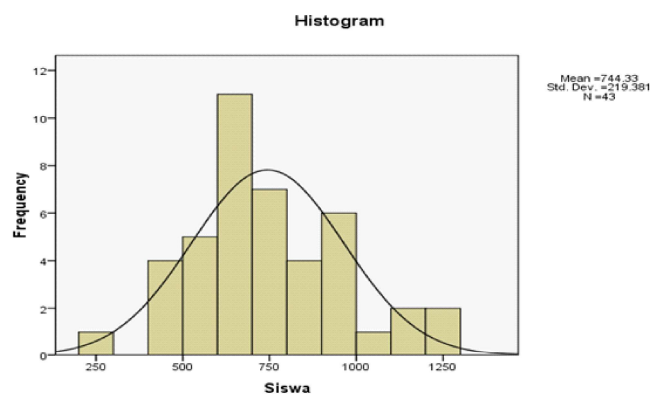
Program SSN dimulai tahun 2004. Sejumlah SMP telah diikutsertakan dalam Program ini melalui seleksi yang melibatkan baik Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Rekrutmen sekolah didasarkan atas kriteria tertentu. Sekolah yang lulus seleksi diikutsertakan dalam sebuah workshop dalam rangka mengajarkan sekolah untuk melakukan analisis terhadap kondisi sekolah. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah sebagai bentuk acuan bagi sekolah dalam rangka peningkatan mutu dari sekolah standar menjadi sekolah mandiri.

Profil Sekolah Sampel

Karakteristik sekolah sampel diperlukan untuk mengetahui gambaran SMP peserta Program SSN. Karakteristik ini memberikan gambaran tipologi SMP yang sedang dinaikkan mutunya dari belum memenuhi standar menjadi sekolah yang hampir atau memenuhi standar. Karakteristik yang digambarkan meliputi status sekolah, letak geografis, besar sekolah, prestasi (jumlah lulusan

dan rerata UN), dan latar belakang pekerjaan orang tua siswa. Asumsinya Program SSN ini tidak hanya mengangkat sekolah yang relatif sudah bagus melainkan juga seluruh tipologi sekolah, yakni kurang, sedang, dan baik atau di daerah pedesaan dan perkotaan atau tipe sekolah menurut kategori lainnya.

Dilihat dari statusnya, 91,3% (42 sekolah) sampel yang mengikuti Program SSN ini adalah sekolah negeri. Gambaran ini belum seperti yang diharapkan karena belum proporsional dengan jumlah status SMP di Indonesia. Statistik Pendidikan SMP Tahun 2009/2010 memperlihatkan bahwa dari 29.866 SMP yang ada di Indonesia, 59,31% (17.714 SMP) berstatus negeri dan 40,69% (12.152 SMP)



Gambar 1. Besarnya Sekolah

adalah swasta (Balitbang, 2010). Gambaran ini memperlihatkan bahwa negeri masih memperoleh porsi lebih banyak jika dibandingkan dengan SMP swasta sehingga memberi implikasi bahwa SMP Negeri dimungkinkan lebih cepat maju jika dibandingkan dengan SMP swasta.

Dilihat dari jumlah siswanya, besarnya SMP sampel peserta Program SSN tampak sangat bervariasi sebagaimana terlihat dalam Gambar 1. Besar SMP sampel terlihat mulai dari SMP dengan jumlah siswa 250 hingga 1250-an siswa. Gambar 1 juga memperlihatkan bahwa modus SMP sampel terlihat pada SMP dengan jumlah siswa antara 600 hingga 700 siswa, yakni terdapat 10 sekolah. Gambaran ini cukup menarik untuk diperhatikan karena asumsi sekolah yang lebih kecil ukurannya (sekolah dengan jumlah siswa yang lebih sedikit) akan lebih mudah pengelolaannya sehingga memungkinkan SNP lebih cepat tercapai.

Tabel 2. Distribusi Rata-rata Persentase Lulusan

% Lulusan	Jumlah	%
76--80	1	2.27
81--85	0	-
86--90	1	2.27
91--95	3	6.82
96--100	39	88.64
Jumlah	44	100.00

Dari Tabel 2 dapat dilihat rata-rata persentase lulusan selama tiga tahun terakhir (2007/2008 hingga 2009/2010). Sebaran persentase lulusan sampel memperlihatkan bahwa dari 44 sekolah sampel, 88,64% sekolah memiliki kategori sangat memuaskan dengan persentase lulusan 96-100%. Secara umum gambaran ini memuaskan karena hanya 4,54% dengan rata-rata persentase lulusan

Tabel 3. Rerata Nilai UN

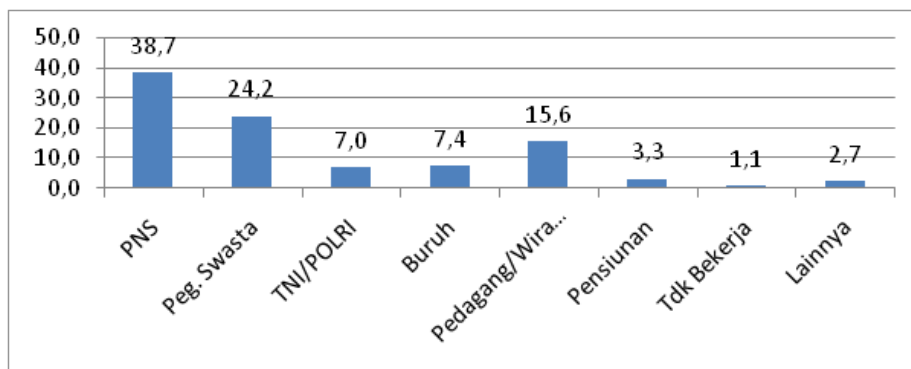
Nilai UN	Jumlah	%
6,1--7,0	2	4.55
7,1--8,0	14	31.82
8,1--9,0	22	50.00
9,1--10,0	6	13.64
Jumlah	44	100.00

di bawah 90%, sisanya (95,46%) persentase lulusan sudah mencapai 91-100%.

Demikian pula halnya, prestasi SMP sampel peserta Program SSN yang terdapat pada Tabel 3 dilihat dari rerata UN-nya selama tiga tahun terakhir (2007/2008 hingga 2009/2010) juga tampak telah baik. Hal ini terlihat bahwa SMP sampel peserta Program SSN memiliki rerata nilai >6 sampai 10,0 sedangkan 6 sekolah (13,64%) dengan rerata 9,1-10,0. Gambaran ini memperlihatkan bahwa sekolah yang dinaikkan standarnya menjadi SSN memiliki prestasi yang baik.

SMP sampel peserta Program SSN memiliki dukungan latar belakang ekonomi keluarga yang relatif baik dilihat dari latar belakang pekerjaan orang tua siswa sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Sebagian besar (78,5%) pekerjaan orang tua siswa adalah pegawai negeri sipil, pegawai swasta, dan pedagang/wiraswasta. Secara ekonomi, latar belakang pekerjaan orang tua siswa ini dapat memberikan dukungan kebutuhan belajar anak di sekolah. Sebaliknya, hanya sebagian kecil siswa yang latar belakang pekerjaan orang tuanya kurang menguntungkan, seperti pensiunan (3,3%), tidak bekerja (1,1%), dan lainnya (2,7%).

Selain itu, profil SMP sampel peserta Program SSN merupakan sekolah yang relatif baik. Seluruh karakteristik yang dimiliki SMP sampel menunjukkan



Gambar 2. Persen Rata-rata Pekerjaan Orang Tua Siswa

gambaran baik seperti sebagian besar sekolah negeri, berada di perkotaan, berprestasi baik, dan memiliki latar belakang pekerjaan orang tua siswa baik. Kondisi tersebut tentu sangat kondusif bagi peningkatan mutu sekolah. Selain itu, gambaran tersebut memberi asumsi bahwa kondisi yang dimiliki SMP sampel tersebut memungkinkan pula bagi sekolah untuk meningkatkan standar sekolah ke arah SNP.

Tabel 4. Rata-rata Nilai UN Tahun Pertama

Rata2 UN	Jumlah	%
5,1--6,0	3	6.82
6,1--7,0	6	13.64
7,1--8,0	8	18.18
8,1--9,0	10	22.73
missing	17	38.64
Jumlah	44	100.00

Dari 44 sekolah yang terdapat pada Tabel 4, 61,4% (27 sekolah) memberikan informasi rata-rata nilai UN tahun pertama ikut Program SSN. Dari 27 sekolah tersebut, 6,82% (3 sekolah) memiliki rata-rata 5,1-6,0; 13,64% (6 sekolah) memiliki rata-rata 6,1-7,0; 18,18% (8 sekolah) memiliki rata-rata 7,1-8,0; dan 22,73% (10 sekolah) memiliki rata-rata 8,1-9,0. Meskipun tidak semua sekolah memberikan jawaban yang diharapkan, namun gambaran ini memperlihatkan bahwa sebagian besar sekolah sampel peserta program SSN merupakan sekolah yang bermutu dengan karakteristik sekolah menurut prestasi baik dilihat dari rerata nilai UN dan rata-rata persentase lulusan.

Pencapaian Standar Nasional Pendidikan

Sebagaimana diketahui, terdapat delapan SNP, namun, karena data yang diperoleh kurang akurat maka standar pembiayaan belum dapat diuraikan dalam studi ini. Tabel 5 secara keseluruhan memperlihatkan nilai pencapaian SNP yang diraih oleh

sekolah. Secara detil masing-masing nilai pencapaian SNP tampak bahwa nilai maksimal untuk 7 SNP sebesar 289, standar isi 25, standar kompetensi lulusan 46, standar proses 18, standar pendidik dan tenaga kependidikan 47, standar sarana prasarana 60, standar pengelolaan 55, dan standar penilaian 38.

Nilai maksimal yang diperoleh dari data berdasarkan 7 SNP sebesar 289 (100%). Pada kenyataannya, dari 44 sampel sekolah di 15 provinsi nilai tertinggi mencapai 241 (83,39%) terjadi di SMP Kota Palangkaraya sedangkan terendah sebesar 170 (58,82%) terjadi di SMP Kota Jambi. Nilai rata-rata pencapaian SNP ini sebesar 208 (71,97%).

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Nilai 7 SNP

Nilai	Frekuensi	%	Kumulatif
241-250	1	2.27	1
231-240	3	6.82	4
221-230	5	11.36	9
211-220	9	20.45	18
201-210	13	29.55	31
191-200	8	18.18	39
181-190	2	4.55	41
171-180	2	4.55	43
161-170	1	2.27	44
Jumlah	44	100.00	

Bila dilihat distribusi frekuensi pada Tabel 6 jumlah terbesar sebanyak 13 sekolah (29,55%) berada pada nilai 201-210. Hal ini sejalan dengan nilai rata-rata sebesar 208. Dengan demikian, pencapaian 7 SNP ini termasuk normal.

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui capaian sekolah berdasarkan nilai di atas dan di bawah rata-rata. Dari jumlah 7 SNP maka terdapat 23 sekolah (52,27%) di atas rata-rata nilai capaian dan 21 sekolah (47,73%) di bawah rata-rata nilai capaian.

Tabel 5. Nilai maksimal, nilai tertinggi dan terendah dicapai tiap SNP

Nilai	7 SNP	Isi	KL	Proses	PTK	Sarpras	Pengelolaan	Penilaian
Maksimal	289	25	46	18	47	60	55	38
Rata-rata	208	21	27	13	33	42	48	24
%	71.97	84.00	58.70	72.22	70.21	70.00	87.27	63.16
Tertinggi dicapai	241	25	44	16	40	53	53	37
%	83.39	100.00	95.65	88.89	85.11	88.33	96.36	97.37
Terendah dicapai	170	16	12	8	22	21	36	15
%	58.82	64.00	26.09	44.44	46.81	35.00	65.45	39.47

Tabel 7. Capaian Nilai Berdasarkan 7 Standar Nasional Pendidikan

Nilai	7 SNP	Isi	KL	Proses	PTK	Sarpras	Pengelolaan	Penilaian
Di atas Rata2	23	26	22	32	26	28	31	23
%	52.27	59.09	50.00	72.73	59.09	63.64	70.45	52.27
Di bawah Rata2	21	18	22	12	18	16	13	21
%	47.73	40.91	50.00	27.27	40.91	36.36	29.55	47.73
Jumlah	44	44	44	44	44	44	44	44

Standar proses memiliki nilai di atas rata-rata yang paling tinggi sebesar 32 sekolah (72,73%) dan di bawah rata-rata sebesar 12 sekolah (27,27%). Standar penilaian memiliki kondisi yang sama dengan jumlah 7 standar. Standar kompetensi lulusan memiliki nilai di atas rata-rata yang paling rendah sebesar 22 sekolah (50,0%) dan di bawah rata-rata sebesar 22 sekolah (50,0%).

Standar Isi

Nilai maksimal yang diperoleh dari data berdasarkan standar isi sebesar 25 (100%). Pada kenyataannya, dari 44 sampel sekolah di 15 provinsi nilai tertinggi mencapai 25 (100,00%) terjadi di SMP Kabupaten Bangka sedangkan terendah sebesar 16 (64,00%) terjadi di SMP Kota Yogyakarta dengan nilai rata-rata sebesar 21 (84,00%). Bila nilai rata-rata (21) digunakan norma untuk menentukan pencapaian standar isi maka terdapat 26 sekolah (59,09%) yang telah mencapai standar isi sedangkan 18 sekolah lainnya (40,91%) belum mencapai standar isi.

Bila dilihat distribusi frekuensi pada Tabel 8 jumlah terbesar sebanyak 18 sekolah (40,91%) berada pada nilai 22-23. Hal ini tidak sejalan dengan nilai rata-rata sebesar 21. Dengan demikian, pencapaian standar isi ini condong ke nilai yang tinggi.

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Nilai Standar Isi

Nilai	Frekuensi	%	Kumulatif
24-25	3	6.82	3
22-23	18	40.91	21
20-21	12	27.27	33
18-19	5	11.36	38
16-17	6	13.64	44
Jumlah	44	100.00	

Dilihat dari standari isi, SMP peserta Program SSN telah memperoleh sosialisasi menyusun, dan melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan

(KTSP). Sosialisasi KTSP diperoleh baik dari dinas pendidikan maupun Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Dalam menyusun KTSP, sekolah melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten/kota. Namun, berkaitan dengan pedoman penyusunan masih ada sekolah yang belum mengetahui adanya pedoman dalam menyusun KTSP. Hal ini terlihat dari jawaban sekolah terhadap pertanyaan apa pedoman yang digunakan dalam menyusun KTSP adalah UU 20/2003.

Sejumlah aspek pendidikan telah dilaksanakan di sekolah peserta Program SSN ini sebagaimana terlihat dalam muatan yang telah dilakukan pada pelaksanaan KTSP. Meskipun terdapat variasi jumlah muatan yang telah dilaksanakan, terdapat sekolah yang telah melaksanakan 8, 9 atau 11 muatan. Berbagai macam muatan yang telah dilaksanakan seperti mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kenaikan/kelulusan, ketuntasan kecakapan hidup, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal atau berwawasan global. Gambaran ini memperlihatkan penyelenggaraan pendidikan bukan hanya substansi mata pelajaran tetapi juga telah melingkupi pengembangan diri, bahkan hingga pengembangan wawasan pendidikan mulai dari keunggulan lokal hingga wawasan global. Kondisi ini tentu saja cukup menguntungkan bagi peningkatan mutu pendidikan.

Standar Kompetensi Lulusan

Nilai maksimal yang diperoleh dari data berdasarkan standar kompetensi lulusan sebesar 46 (100%). Pada kenyataannya, dari 44 sampel sekolah di 15 provinsi nilai tertinggi mencapai 44 (95,65%) terjadi SMP Negeri 1 Palangkaraya sedangkan terendah sebesar 12 (26,09%) terjadi di SMP Negeri 3 Palangkaraya dengan nilai rata-rata sebesar 27 (58,70%). Bila nilai rata-rata (27) digunakan norma untuk menentukan pencapaian standar kompetensi lulusan maka

terdapat 22 sekolah (50,00%) yang telah mencapai standar kompetensi lulusan sedangkan 22 sekolah lainnya (50,00%) belum mencapai standar kompetensi lulusan.

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Nilai Standar Kompetensi Lulusan

Nilai	Frekuensi	%	Kumulatif
41-45	1	2.27	1
36-40	3	6.82	4
31-35	6	13.64	10
26-30	13	29.55	23
21-25	14	31.82	37
16-20	6	13.64	43
11-15	1	2.27	44
Jumlah	44	100.00	

Bila dilihat distribusi frekuensi pada Tabel 9 jumlah terbesar sebanyak 14 sekolah (31,82%) berada pada nilai 21-25, hal ini kurang sejalan dengan nilai rata-rata sebesar 27. Dengan demikian, pencapaian standar kompetensi lulusan ini condong ke nilai yang lebih rendah.

Dilihat dari standar kompetensi lulusan (SKL), sekolah peserta Program SSN juga telah memperlihatkan mutu sekolah baik. Hal ini tampak dari rata-rata persentase lulusan selama tiga tahun terakhir sebagaimana telah diuraikan dalam subjudul profil sekolah di atas, dan prestasi baik akademik maupun nonakademik. Sementara untuk prestasi akademiknya, sekolah peserta Program SSN pada umumnya memiliki prestasi seperti juara olimpiade matematika, olimpiade fisika, atau lomba bahasa Inggris. Juara yang diperoleh meliputi juara provinsi dan nasional. Selanjutnya, prestasi nonakademik meliputi juara olahraga, kegiatan kepemudaan, dan seni daerah. Olahraga meliputi catur, dan seni bela diri seperti taekwondo dan karate. Seni daerah meliputi randai yang merupakan seni daerah dari Sumatera Barat. Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan pramuka.

Standar Proses

Nilai maksimal yang diperoleh dari data berdasarkan standar proses sebesar 18 (100%). Pada kenyataannya, dari 44 sampel sekolah di 15 provinsi nilai tertinggi mencapai 16 (88,89%) terjadi di SMP Kota Palangkaraya sedangkan terendah sebesar 8 (44,44%) terjadi di SMP Kota Yogyakarta dengan nilai rata-rata sebesar 13 (72,22%). Bila nilai rata-

rata (13) digunakan norma untuk menentukan pencapaian standar proses maka terdapat 32 sekolah (72,73%) yang telah mencapai standar proses sedangkan 12 sekolah lainnya (27,27%) belum mencapai standar proses.

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Nilai Standar Proses

Nilai	Frekuensi	%	Kumulatif
15-16	8	18.18	8
13-14	24	54.55	32
11-12	8	18.18	40
09-10	2	4.55	42
07-08	2	4.55	44
Jumlah	44	100.00	

Bila dilihat distribusi frekuensi pada Tabel 10 jumlah terbesar sebanyak 24 sekolah (54,55%) berada pada nilai 13-14, hal ini sejalan dengan nilai rata-rata sebesar 13. Dengan demikian, pencapaian standar proses ini normal.

Dari sejumlah sekolah sampel, gambaran proses pembelajaran di SMP peserta Program SSN juga tampak telah memadai. Sebanyak 90-100 persen mata pelajaran yang diajarkan di sekolah sudah memiliki Rencana Pelaksanaan Pelajaran (RPP). Namun, pedoman yang digunakan dalam menyusun RPP berbeda-beda. Terdapat sekolah yang menggunakan silabus mata pelajaran sebagai dasar penyusunan RPP. Terdapat sekolah yang menggunakan Permendiknas Nomor 41 tentang standar proses dalam menyusun RPP.

Selain telah menyusun RPP dalam pembelajarannya, kepala SMP peserta Program SSN telah melakukan pemantauan pada masing-masing tahapan pembelajaran. Pada tahap perencanaan pembelajaran, kepala sekolah melakukan supervisi administrasi atau perangkat pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, kepala sekolah mengaku melihat kesesuaian antara perangkat atau administrasi pembelajaran dengan pelaksanaan pembelajarannya atau melakukan supervisi akademik. Pada tahap penilaian, kepala sekolah melihat tahap-tahap penilaian yang dilakukan oleh guru. Tahapan penilaian ini dapat dilihat melalui supervisi administrasi. Dalam melakukan supervisi, terdapat kepala sekolah membuat catatan terhadap temuan-temuan terhadap pemantauan pembelajaran.

Selain pemantauan, kepala sekolah peserta Program SSN juga mengevaluasi terhadap masing-

masing tahapan pembelajaran yang dilakukan oleh para guru. Pada tahap perencanaan, kepala sekolah menilai kesesuaian antara keterampilan dasar (KD) dengan indikator. Pada tahap pelaksanaan, kepala sekolah menilai ketercapaian antara KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Pada tahap penilaian, kepala sekolah menilai kesesuaian instrumen penilaian yang digunakan. Dalam melakukan evaluasi pembelajaran, kepala sekolah juga memberikan tindak lanjut hasil temuannya dengan cara memberikan arahan sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Sebagai akuntabilitas sekolah, kepala sekolah juga menyampaikan hasil pengawasan proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan seperti komite sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Nilai maksimal yang diperoleh dari data berdasarkan standar pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 47 (100%). Pada kenyataannya, dari 44 sampel sekolah di 15 provinsi nilai tertinggi mencapai 40 (85,11%) terjadi di SMP Kota Palembang sedangkan terendah sebesar 22 (46,81%) terjadi di SMP Kota Padang dengan nilai rata-rata sebesar 33 (70,21%). Bila nilai rata-rata (33) digunakan norma untuk menentukan pencapaian standar proses maka terdapat 26 sekolah (59,09%) yang telah mencapai standar pendidik dan tenaga kependidikan, sedangkan 18 sekolah lainnya (40,91%) belum mencapai standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Nilai	Frekuensi	%	Kumulatif
40-42	2	4.55	2
37-39	12	27.27	14
34-36	9	20.45	23
31-33	8	18.18	31
28-30	9	20.45	40
25-27	2	4.55	42
22-24	2	4.55	44
Jumlah	44	100.00	

Bila dilihat distribusi frekuensi pada Tabel 11 jumlah terbesar sebanyak 12 sekolah (27,27%) berada pada nilai 37-39, hal ini tidak sejalan dengan nilai rata-rata sebesar 33. Dengan demikian,

pencapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan condong ke nilai yang tinggi.

Dari sejumlah sekolah sampel, gambaran pendidik di SMP peserta Program SSN juga tampak relatif telah memadai. Hal ini terlihat bahwa 77-97% guru di SMP peserta Program SSN telah memiliki S1 atau Diploma 4. Sementara dilihat dari relevansinya, terdapat 98-100 persen guru telah sesuai antara latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang mereka ajarkan. Kondisi ini memberi asumsi bahwa guru sebagai input pendidikan di SMP peserta Program SSN dapat mendukung terlaksananya pembelajaran yang baik di sekolah.

Berkaitan dengan sertifikat pendidik, pada umumnya guru pada SMP peserta Program SSN telah memiliki sertifikat pendidik. Hal ini terlihat bahwa 95-98 persen para guru di SMP peserta Program telah memiliki sertifikat pendidik. Gambaran ini juga semakin memberikan tambahan penekanan bahwa kualifikasi guru sangat menentukan bagi penyelenggaraan pendidikan yang baik di sekolah, namun, terdapat satu SMP peserta Program SSN yang 30 persen gurunya memiliki sertifikat pendidik. Hal ini tampak kontras dari gambaran sebelumnya, tetapi dilihat dari segi mutu tampak tidak mempengaruhi sebagaimana terlihat dari rata-rata UN-nya pada tiga tahun terakhir tetap berada pada kisaran angka 8, yakni 8,33 pada tahun 2007/2008, 8,89 pada tahun 2008/2009, dan 8,75 pada tahun 2009/2010.

Kepala sekolah sebagai manajer sekolah juga telah memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan. Pada umumnya kepala sekolah peserta Program SSN telah S1 bahkan di antaranya ada yang S2. Kondisi ini memberi asumsi bahwa latar belakang pendidikan kepala sekolah dapat mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang baik. Selain itu, kepala sekolah di SMP peserta Program SSN pada umumnya memiliki sertifikat pendidik. Pengalaman kepala sekolah di bidang pendidikan dari 22-29 tahun juga memberikan dukungan bagi penyelenggaraan pendidikan yang baik di sekolah. Masa yang cukup panjang untuk pengabdian sehingga pengalaman tersebut memberikan pengetahuan yang mendalam tentang penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pada gilirannya, pengalaman yang dimiliki kepala sekolah diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan yang baik di sekolah.

Sebaliknya, gambaran tenaga kependidikan di SMP peserta Program SSN tampak bervariasi. Latar

belakang pendidikan kepala administrasi sekolah terlihat mulai dari SMA, Diploma 3 jurusan keuangan, hingga SMK jurusan tata niaga. Hal ini memperlihatkan bahwa rekrutmen tenaga administrasi di tingkat sekolah belum sesuai latar belakang pendidikan yang dibutuhkan sehingga memiliki latar pendidikan yang bervariasi. Kondisi ini tidak mengkhawatirkan karena ditinjau dari segi mutu tidak mempengaruhi. Hal ini terlihat bahwa rata-rata nilai UN masing-masing sekolah peserta Program SSN tampak masih pada kisaran antara 7-8.

Standar Sarana dan Prasarana

Nilai maksimal yang diperoleh dari data berdasarkan standar sarana dan prasarana sebesar 60 (100%). Pada kenyataannya, dari 44 sampel sekolah di 15 provinsi nilai tertinggi mencapai 53 (88,33%) terjadi di SMP Negeri 1 Yogyakarta sedangkan terendah sebesar 21 (35,00%) terjadi di SMP Negeri 8 Yogyakarta dengan nilai rata-rata sebesar 42 (70,00%). Bila nilai rata-rata (42) digunakan norma untuk menentukan pencapaian standar sarana dan prasarana maka terdapat 28 sekolah (63,64%) yang telah mencapai standar sarana dan prasarana sedangkan 16 sekolah lainnya (36,36%) belum mencapai standar sarana dan prasarana.

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Nilai Standar Sarana dan Prasarana

Nilai	Frekuensi	%	Kumulatif
51-55	3	6.82	3
46-50	12	27.27	15
41-45	16	36.36	31
36-40	5	11.36	36
31-35	5	11.36	41
26-30	2	4.55	43
21-25	1	2.27	44
Jumlah	44	100.00	

Bila dilihat distribusi frekuensi pada Tabel 12 jumlah terbesar sebanyak 16 sekolah (36,36%) berada pada nilai 41-45, hal ini sejalan dengan nilai rata-rata sebesar 42. Dengan demikian, pencapaian standar sarana dan prasarana ini normal.

Berkaitan dengan sarana prasarana sekolah, variasi terjadi pada prasarana sekolah seperti luas lahan dan daya listrik sekolah. Terdapat SMP

memiliki luas 4.322 m², 6.207 m² atau 24.875 m² sehingga terdapat ketimpangan dalam luas lahan. Demikian pula halnya, daya listrik yang terpasang antara satu sekolah dengan lainnya tampak bervariasi mulai dari 5.500 sampai 7.300 watt.

Sementara itu, SMP peserta Program SSN memiliki prasarana sekolah meliputi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat ibadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang OSIS, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/olahraga dengan kondisi baik. Namun, terdapat sekolah yang mengaku sejumlah prasarana sekolah rusak seperti laboratorium IPA, tempat ibadah atau ruang UKS.

Standar Pengelolaan

Nilai maksimal yang diperoleh dari data berdasarkan standar pengelolaan sebesar 55 (100%). Dari 44 sampel sekolah di 15 provinsi nilai tertinggi 53 (96,36%), yaitu di SMP Kabupaten Sidoarjo sedangkan terendah sebesar 21 (65,45%) terjadi di SMP Kota Makasar dengan nilai rata-rata 48 (87,27%). Bila nilai rata-rata (48) digunakan norma untuk menentukan pencapaian standar pengelolaan maka terdapat 31 sekolah (70,45%) yang telah mencapai standar pengelolaan sedangkan 13 sekolah lainnya (29,55%) belum mencapai standar pengelolaan.

Tabel 13. Distribusi Frekuensi Nilai Standar Pengelolaan

Nilai	Frekuensi	%	Kumulatif
51-53	12	27.27	12
48-50	19	43.18	31
45-47	7	15.91	38
42-44	3	6.82	41
39-41	2	4.55	43
36-38	1	2.27	44
Jumlah	44	100.00	

Bila dilihat distribusi frekuensi pada Tabel 13 jumlah terbesar sebanyak 19 sekolah (43,18%) berada pada nilai 48-50, hal ini sejalan dengan nilai rata-rata sebesar 48. Dengan demikian, pencapaian standar pengelolaan ini normal.

Berkaitan dengan pengelolaan sekolah, masing-masing SMP peserta Program SSN telah memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi sekolah

meliputi hal-hal seperti prestasi, agama, dan budi pekerti. Visi berkaitan dengan prestasi meliputi prestasi yang tinggi, unggulan IPTEK, berwawasan luas, dan mampu berkompetisi dalam skala nasional dan internasional. Terdapat juga sekolah yang memiliki visi tidak hanya prestasi akademik melainkan juga nonakademik. Visi tentang agama adalah berkaitan dengan iman dan taqwa (imtaq) sedangkan visi berkaitan dengan pekerti meliputi berbudi pekerti luhur, bermoral, karakter dan budaya bangsa serta berwawasan lingkungan.

Dalam rangka pengelolaan, SMP peserta Program SSN pada umumnya telah memiliki dokumen seperti KTSP, kalender pendidikan, struktur organisasi sekolah, pendayagunaan PTK, peraturan akademik, tata tertib sekolah, kode etik sekolah, dan biaya operasional sekolah. Selain dokumen tersebut, sekolah juga memiliki data tentang siswa baru, siswa, guru, sarana prasarana, dan keuangan secara lengkap dan akurat.

Untuk mencapai tujuan sekolah, pengelolaan yang dilakukan oleh SMP peserta Program SSN meliputi kegiatan siswa, pengembangan kurikulum, pendayagunaan dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, anggaran pendidikan, dan keterlibatan masyarakat. Berkaitan dengan pengelolaan kegiatan siswa, SMP peserta Program SSN juga telah mengelola kegiatan seleksi penerimaan siswa baru, layanan konseling, kegiatan ekstra kurikuler, pembinaan prestasi unggulan, dan pelacakan terhadap alumni.

Standar Penilaian

Nilai maksimal yang diperoleh dari data berdasarkan standar penilaian sebesar 38 (100%). Dari 44 sampel sekolah di 15 provinsi nilai tertinggi 37 (97,37%) terjadi di SMP Kabupaten Bangka sedangkan terendah 15 (39,47%) terjadi di SMP Kota Medan dengan nilai rata-rata 24 (63,16%). Bila nilai rata-rata (24) digunakan norma untuk menentukan pencapaian standar penilaian maka terdapat 23 sekolah (52,27%) yang telah mencapai standar penilaian sedangkan 21 sekolah lainnya (47,73%) belum mencapai standar penilaian.

Bila dilihat distribusi frekuensi pada Tabel 14 jumlah terbesar sebanyak 15 sekolah (34,09%) berada pada nilai 23-26, hal ini sejalan dengan nilai rata-rata sebesar 24. Dengan demikian, pencapaian standar penilaian ini normal.

Tabel 14. Distribusi Frekuensi Nilai Standar Penilaian

Nilai	Frekuensi	%	Kumulatif
35-39	1	2.27	1
31-34	2	4.55	3
27-30	9	20.45	12
23-26	15	34.09	27
19-22	12	27.27	39
15-18	5	11.36	44
Jumlah	44	100.00	

Berkaitan dengan penilaian, guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa pada awal semester dan ketika akan dilakukan penilaian. Jenis penilaian yang digunakan meliputi tes, pengamatan, penugasan terstruktur, dan tugas mandiri. Namun, ada juga guru yang menggunakan lembar kerja siswa (LKS) dan portofolio. Penilaian tersebut didasarkan pada RPP dan merupakan perangkat buatan guru. Setelah melakukan penilaian, guru melakukan analisis. Langkah yang umumnya dilakukan meliputi mendokumentasikan hasil penilaian siswa, menganalisis hasil penilaian, dan membandingkannya dengan hasil penilaian guru lainnya. Selain itu, terdapat pula guru yang melakukan tindak lanjut melalui remedial. Guru juga memberikan komentar pada penilaian yang diberikan. Komentar tersebut pada pekerjaan rumah siswa, hasil ulangan siswa, dan hasil midsemester. Selain komentar, guru juga memanfaatkan hasil penilaian tersebut untuk perbaikan pembelajaran seperti untuk program remedial dan pengayaan, penyusunan RPP untuk tahun berikutnya.

Diskusi

Dalam diskusi ini dibahas tentang perbandingan sekolah tertinggi dan terendah. Perbandingan dilakukan pada 10% sampel yang memiliki nilai paling tinggi dan paling rendah. Dengan demikian, terdapat 4 sekolah yang memiliki nilai paling tinggi dan 4 sekolah yang memiliki nilai paling rendah. Jumlah nilai paling tinggi adalah 232, 234 (2 sekolah), dan 241 sedangkan nilai paling rendah adalah 170, 171, 175, dan 181.

SMP di Kota Palangkaraya dengan pencapaian tertinggi (241) dibandingkan dengan 43 sekolah lainnya ternyata memiliki nilai tertinggi di standar kompetensi lulusan dan standar proses, sedangkan standar lainnya di atas rata-rata kecuali standar

penilaian yang berada di bawah rata-rata. SMP di Kabupaten Sidoarjo yang pencapaiannya nomor 2 tertinggi (234) memiliki nilai tertinggi di standar pengelolaan sedangkan standar lainnya di atas rata-rata kecuali standar penilaian berada di bawah rata-rata. SMP di Kota Jakarta dengan pencapaian nomor 2 tertinggi (234) semua nilai SNP di atas rata-rata kecuali standar pengelolaan. SMP di Kabupaten Bangka dengan pencapaian nomor 3 tertinggi (232) memiliki nilai tertinggi di standar penilaian sedangkan standar lainnya di atas rata-rata kecuali standar pendidik dan tenaga kependidikan berada di bawah rata-rata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai tertinggi pencapaian SNP tidak diperoleh dari SMP yang berada di pulau Jawa melainkan terjadi di provinsi Kalimantan Tengah dan Bangka Belitung.

SMP di Kota Jambi dengan pencapaian terendah (170) dibandingkan dengan 43 sekolah lainnya karena semua nilainya lebih rendah dari rata-rata. SMP di Kota Palangkaraya dengan pencapaian nomor 2 terendah (171) memiliki nilai standar isi lebih tinggi dari rata-rata sedangkan nilai standar lainnya di bawah rata-rata. SMP di Kota Yogyakarta dengan pencapaian nomor 3 terendah (175) memiliki nilai standar pendidik dan tenaga kependidikan lebih tinggi dari rata-rata, sedangkan standar lainnya di bawah rata-rata. SMP di Kota Banjarmasin dengan pencapaian nomor 4 terendah (181) memiliki nilai standar isi lebih tinggi dari rata-rata, sedangkan standar lainnya di bawah rata-rata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai terendah pencapaian SNP tidak diperoleh dari SMP yang berada di pulau luar Jawa melainkan juga terjadi di provinsi DI Yogyakarta.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dinyatakan bahwa pencapaian SNP yang bagus tidak terjadi hanya pada SMP yang berada di pulau Jawa melainkan juga di pulau-pulau lainnya. Untuk menentukan apakah ada perbedaan pencapaian antara pulau Jawa dengan pulau lainnya maka perlu dilakukan analisis bentuk lain.

Tinggi rendahnya nilai adalah akibat adanya pembinaan dalam rangka implementasi SNP. Pembinaan dapat berasal dari pusat maupun daerah. Studi ini menemukan bahwa 84,1% (37 sekolah) sampel menyatakan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota melakukan pembinaan, sedangkan sisanya 15,9% (7 sekolah) tidak memberikan jawaban. Angka tersebut memperlihatkan adanya kepedulian

dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Atas dasar pengakuan sekolah, pembinaan yang dilakukan seperti sosialisasi, melakukan bimbingan dan arahan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program, pembinaan program pengembangan mutu akademik, dan pengarahan penyusunan RAPBS dana SSN.

Selain Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Daerah (Bawasda), Pusat seperti Dit. PSMP, dan Inspektorat Jenderal, Dinas Pendidikan Provinsi, pengawas, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan tim independen melakukan monitoring sekolah dalam rangka implementasi Program SSN. Meskipun monitoring dan evaluasi belum detil, namun Bawasda telah melakukan monitoring SPS. Dit. PSMP telah melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SSN dengan cara memberikan angket, dan melakukan pemeriksaan SPJ. Inspektorat Jenderal telah memeriksa kesesuaian anggaran dengan kegiatan, penggunaan dana, dan fasilitas. Dinas Pendidikan Provinsi telah melakukan supervisi kurikulum dan PBM serta monitoring. Pengawas telah melakukan pembinaan, sosialisasi SSN, supervisi kelas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. LPMP telah melakukan bimbingan dan arahan dengan melihat dokumen bukti fisik, monitoring dan supervisi pelaksanaan delapan SNP. Tim independen telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SSN.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa SMP peserta Program SSN memiliki kondisi yang relatif baik bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Profil sekolah memperlihatkan bahwa SMP peserta Program SSN merupakan sekolah yang relatif baik dan memiliki nilai rata-rata UN pada kisaran 7-8. Hal ini terlihat dari lokasi di perkotaan, latar belakang pekerjaan orang tua, dan prestasi akademiknya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tujuh SNP maka SNP telah tercapai sebesar 52,27% sekolah atau lebih dari separuh sekolah yang ada. SNP yang terendah tercapai adalah standar kompetensi lulusan sebesar 50,00% atau hanya separuh sekolah yang ada dan tertinggi tercapai adalah standar proses sebesar 72,73% atau hampir sepertiga sekolah.

Dilihat dari standar isi, telah tercapai 59,09%

sekolah. SMP peserta Program SSN telah memperoleh sosialisasi, menyusun, dan melaksanakan KTSP. Gambaran ini merupakan kondisi yang kondusif bagi tercapainya mutu pendidikan. pelaksanaan KTSP di tingkat sekolah meliputi mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kenaikan/kelulusan, ketuntasan kecakapan hidup, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal atau berwawasan global.

Gambaran SKL telah tercapai 50,00% sekolah dengan kondisi kondusif bagi pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan. Hal ini tampak dari persentase lulusan setiap tahun, prestasi akademik maupun nonakademik. Kejuaraan yang berhasil diraih mencerminkan nilai tambah masing-masing sekolah.

Dilihat standar proses, telah tercapai 72,73% sekolah, dalam pembelajaran di SMP peserta Program SSN juga telah memadai. Hal ini terlihat bahwa 90 hingga 100 persen pembelajaran di sekolah sudah memiliki RPP. Selain RPP, pembelajaran juga kondusif dari usaha kepala sekolah yang melakukan pemantauan dan evaluasi pembelajaran.

Gambaran pendidik di SMP peserta Program SSN juga relatif telah memadai dengan telah tercapai 59,09% sekolah. Hal ini terlihat bahwa 77-97% guru di SMP peserta Program SSN telah memiliki S1 atau Diploma 4, dan 98-100% guru telah sesuai antara latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang mereka ajarkan. Kepala sekolah sebagai manajer sekolah juga telah memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan.

Gambaran sarana dan prasarana di SMP peserta Program SSN telah memadai dengan tercapai 63,64% sekolah. Hal ini terlihat prasarana seperti luas lahan dan daya listrik yang memadai, terdapat

ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha sekolah, dan jenis ruang lainnya yang cukup memadai.

Dilihat dari standar pengelolaan, telah tercapai sebesar 70,45% sekolah. Hal ini terlihat dari sekolah yang telah memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah serta penerapan masing-masing sesuai dengan perencanaannya.

Berdasarkan standar penilaian maka telah tercapai sebesar 52,27% sekolah. Hal ini terlihat dari rancangan dan kriteria penilaian yang dilakukan oleh guru seperti tes pengamatan, penugasan terstruktur, tugas mandiri, LKS, portofolio, analisis, dan remedial.

Saran kepada pengelola program SSN

Pengelola program SSN hendaknya memiliki peta sekolah standar untuk dapat ditingkatkan menjadi sekolah mandiri menurut rata-rata nilai UN dan geografisnya. Sekolah dengan mutu (rata-rata nilai UN) rendah juga terjadi di perkotaan. Selain itu, mutu (rata-rata nilai UN) juga memiliki kategori sehingga prioritas dapat ditentukan pada sekolah dengan rata-rata nilai UN paling rendah dan di daerah pedesaan. Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa saran diberikan untuk Program SSN, yaitu target sasaran program sebaiknya tidak hanya di perkotaan melainkan juga di pedesaan, memiliki peta sekolah sehingga diketahui yang sekolah standar menurut rata-rata nilai UN dan geografis, menentukan prioritas target sasaran atas dasar rata-rata nilai UN dan letak geografis. Selain itu, disarankan agar nilai SKL ditingkatkan sehingga SNP akan meningkat sedangkan standar pembiayaan agar dilakukan penelitian tersendiri.

Pustaka Acuan

- Badan Penelitian dan Pengembangan. 2010. *Statistik Persekolahan SMP, Tahun 2009/2010*. Jakarta: Pusat Statistik Pendidikan.
- Brinkerhoff, Robert O, D.M. Brethower, Jeri Nowakowski, and T. Hluchy. 1983. *Program Evaluation, A Practitioner's Guide for Trainers and Educators*. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing
- Creswell, John W. 2003. *Research Design. Edisi Kedua*. California: Sage Publication
- Chelimsky, Eleanor. 1989. *Program Evaluation: Pattern and Directions. Second Edition*. Washington, D.C: The American Society for Public Administration.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009*. Jakarta: Pusat Informasi dan Humas

- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. 2008. *Panduan Pelaksanaan Pembinaan SMP Standar Nasional*. Jakarta: Dit. PSMP
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 2005. *Panduan Umum: Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Ditjen Mandikdasmen
- Langbein, Laura dan Claire L. Felbinger. 2006. *Public Program Evaluation*. New York: ME Sharpe, Inc.
- Mark, Melvin M, Gary T. Henry, dan George Julnes. 2000. *Evaluation: An Integrated Framework for Understanding, Guiding, and Improving Public and Nonprofit Policies and Programs*. California: Jossey-Bass
- Posavac, Emil J., dan Raymond G. Carey. 1980. *Program Evaluation, Methods and Case Studies*. New Jersey: Prentice Hall
- Sekretariat Negara. 2009. *Peraturan Pemerintah Nomor 47, Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Singarimbun dan Sofian Effendi. Editor. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Stufflebeam, Daniel. 2003. *The CIPP Model for Evaluation: Update, Review of Implementation, Checklist to Guide Implementation*. <http://www.wilmich.edu/evalctr> diakses pada 10 Oktober 2010